

**PELAKSANAAN KEWENANGAN YUDISIAL BAWASLU DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister

Program Studi Magister Hukum



Diajukan oleh

MOHAMMAD ALI

201802019

Kepada

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2020

**PELAKSANAAN KEWENANGAN YUDISIAL BAWASLU DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

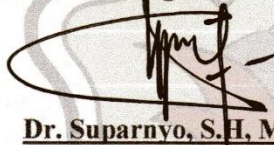
Disusun oleh :

**MOHAMMAD ALI
201802019**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

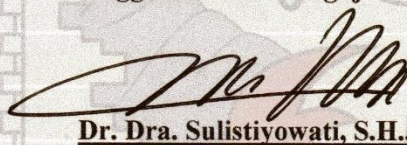
pada tanggal 29 Februari 2020

Pembimbing Utama



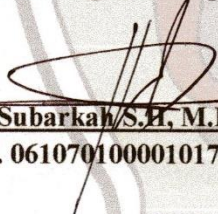
**Dr. Suparno, S.H, M.S
NIS. 06107010000001014.**

Anggota Dewan Penguji I



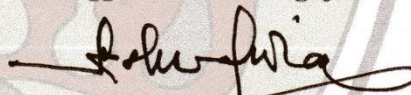
**Dr. Dra. Sulistiwati, S.H., C.N
NIS. 0610701000001268.**

Pembimbing Pendamping




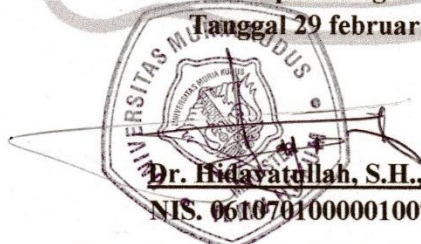
**Dr. Subarkah/S.H, M.Hum
NIS. 061070100001017.**

Anggota Dewan Penguji II



**Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H
NIS. 0610701000001013.**

**Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 29 februari 2020**



**Dr. Hidayatollah, S.H., M.Hum.
NIS. 0610701000001007.**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Motto dan Persembahan

Motto :

Katakanlah “ Adakah orang-orang yang mengetahui dan orang - orang yang tidak mengetahui ? sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran “ (QS. Az. Zumar (Ayat 9).

Petani adalah benteng terakhir pertahanan negeri (KH.Hasyim Asy'ari).

Petani itu adalah seorang yang berkeyakinan baik, orang yang Bermoral tinggi dan memiliki cinta kepada kebebasan yang Kokoh (Che Guevara).

Persembahan :

Tesis ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak H. Turmudzi (Alm) dan Ibu Hj. Muslihah kedua orang tuaku yang sampai hari ini selalu memberikan yang terbaik untukku.
2. Anisatun Mu'awaroh, Faried Maulana Anvasya dan Faurura Rihani Anvasya istri dan anakku tercinta terima kasih atas perhatian, pengertian dan dorongannya.
3. M.Ghozali, S,T dan Ahmad Sugiarto, S.E,M,Sy kedua adikku yang selalu memberikan motivasi dan suntikan semangat.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad ali

NIM : 201802019

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen Pembimbing.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Kudus, 28 Januari 2020

Yang membuat pernyataan



Mohammad Ali

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan Rahmat Hidayah dan juga Inayahnya. Salam takdim kepada baginda Rasulullah SAW yang menjadi pelita dunia sehingga mampu membimbing umatnya untuk menuju jalan yang benar.

Penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN KEWENANGAN YUDISIAL BAWASLU DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PROSES PEMILU “ dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat magister di bidang hukum.

Penulis menyadari karya ini jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis kuasai.maka dengan kerendahan hati penulis berharap ada kritik, saran dan masukan sehingga karya ini bisa bermanfaat bagi khalayak yang haus akan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini dengan penuh hormat penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Suparno, S.H, M.S selaku Rektor Universitas Muria Kudus dan Dosen Pembimbing utama penulisan karya ilmiah berupa tesis ini. yang terus berikhtiar mensejajarkan UMK dengan perguruan tinggi besar lainnya.
2. Dr. Sukresno, S.H, M.Hum Dekan Fakultas Hukum Uniersitas Muria Kudus, yang selalu berjuang untuk kemajuan fakultas Hukum.

3. Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum Kepala Progam Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus yang terus berusaha memberikan yang terbaik bagi mahasiswa progam Magister Ilmu Hukum.
 4. Dr. Subarkah, S.H, M.Hum Dosen pembimbing yang tanpa kenal lelah dan penuh keihlasan memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
 5. Ketua Bawaslu Kabupaten Pati beserta anggota dan jajaran staff sekretariat, Ketua KPU Kabupaten Pati beserta anggota dan jajaran staff sekretariat, Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati dan Pengurus DPD PAN Kabupaten Pati yang telah memberikan kesempatan penulis melakukan penelitian.
 6. Teman-teman angkatan XI Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus. Semoga kita tetap terus menjalin komunikasi dan silaturahmi.
- Demikian sekedar yang dapat penulis sajikan semoga Allah SWT selalu meridloi jalan yang kita tempuh dan akhirnya penulis berharap karya kecil ilmiah yang sederhana ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Kudus, 28 Januari 2020

Penulis

Mohammad Ali

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Sampul Depan (Cover) | |
| Halaman Judul | I |
| Halaman Persetujuan | II |
| Halaman Motto dan Persembahan | III |
| Halaman Pernyataan Orisinalitas | IV |
| Kata Pengantar | V |
| Daftar Isi | VI |
| Abstrak | X |
| Abstract | XI |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Keaslian Penelitian | 11 |
| D. Tujuan Penelitian | 13 |
| E. Manfaat Penelitian | 13 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 20 |
| A. Pemilihan Umum (Pemilu) | 21 |
| B. Penyelenggara Pemilu | 24 |
| 1. Tugas dan Wewenang KPU | 25 |
| 2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu | 26 |
| 3. Tugas dan wewenang serta Kewajiban Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) | 31 |

| | |
|--|-----------|
| C. Sengketa Proses Pemilu | 32 |
| D. Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu | 33 |
| Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 38 |
| A. Implementasi Kewenangan Yudisial Bawaslu Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Antara Komisi Pemilihan Umum dan Peserta Pemilu Tahun 2019 | 38 |
| 1. Tahapan – tahapan Pemilu 2019 | 42 |
| 2. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu .. | 45 |
| a. Menerima permohonan sengketa proses Pemilu | 46 |
| b. Verifikasi berkas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu | 50 |
| c. Pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu Tahun 2019 | 51 |
| d. Sidang Adjudikasi | 60 |
| e. Putusan Bawaslu Kabupaten Pati Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu | 63 |
| B. Profesionalitas Bawaslu Dalam Menjalankan Wewenang dan Tugas Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019..... | 72 |
| 1. Profesionalitas Bawaslu dalam menjalankan Kewenangan dan tugas Bawaslu penyelesaian sengketa proses Pemilu antara penyelenggara dengan peserta pemilu | 73 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Profesionalitas Bawaslu dalam menjalankan Kewenangan dan tugas Bawaslu menyelesaikan sengketa proses Pemilu antar sesama peserta pemilu | 80 |
| BAB IV PENUTUP | 84 |
| A. Simpulan | 84 |
| B. Saran | 83 |

Lampiran



“PELAKSANAAN KEWENANGAN YUDISIAL BAWASLU DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PROSES PEMILU “

Mohammad Ali¹

Universitas Muria Kudus

Mohaly.pati@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan umum adalah salah satu ciri dari negara demokratis. Indonesia menetapkan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam penyelenggaraannya diatur dengan Undang-Undang nomor Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu serentak karena memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota serta pemilihan Presiden dan wakil Presiden.

Penyelenggaraan pemilu yang memunculkan kontestasi selalu diwarnai permasalahan seperti pelanggaran dan sengketa baik sengketa proses maupun sengketa hasil pemilu. Untuk mengetahui permasalahan pemilu khususnya sengketa proses diperlukan penelitian tentang mekanisme dan atau tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang diberi kewenangan mengawasi, menyelesaikan, dan memutus pelanggaran yang terjadi dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.

Penelitian dilaksanakan untuk memotret dan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen.

Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan Bawaslu meliputi permohonan penyelesaian sengketa pemilu, verifikasi, penyelesaian sengketa proses pemilu.

Kata kunci : *Permohonan, Verifikasi, Mediasi, Adjudikasi.*

1. Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.

"IMPLEMENTATION OF BAWASLU JUDICIAL AUTHORITY IN COMPLETING ELECTION DISPUTES ELECTION PROCESS "

Mohammad Ali¹

Universitas Muria Kudus

Mohaly.pati@gmail.com

ABSTRACT

Elections are one of the characteristics of a democratic country. Indonesia stipulates that elections are held every five years as mandated by the 1945 Constitution and in its implementation regulated by Law number 2017 concerning General Elections. The 2019 election is a simultaneous election because it elects members of the DPR, DPD, Provincial DPRD, Regency / City DPRD as well as the election of the President and Vice President.

Election implementation that raises contestation is always colored by problems such as violations and disputes, both process disputes and election results disputes. To find out election problems, especially process disputes, it is necessary to research the mechanism and or procedures for dispute resolution of the electoral process by Bawaslu as the election organizer who is given the authority to supervise, resolve, and decide on violations that occur during the stages of election administration.

The research was conducted to photograph and find out how the election process dispute resolution by Bawaslu. The research method used is the method of library research and field research methods by conducting interviews, observation, and document collection.

The procedures for the resolution of election process fees carried out by Bawaslu include requests for election dispute resolution, verification, election process dispute resolution.

Keywords: Request, Verification, Mediation, Adjudication.

1. Student of Law Master of Muria Kudus University.